



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD FIKSER
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 156822

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.061.186.468

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 608.719.500
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 553.354.011
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/525 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN YAPEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 398.434.581
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1800 m2/630 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN YAPEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.678.376

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.136.682

1. MOBIL, NISSAN LIVINA VL 1.5 4X2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 167.136.682
2. MOTOR, YAMAHA XMAX ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 245.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 450.000.000

Sub Total Rp. 3.010.323.150

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.010.323.150



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.